

Sinopsis Mata Kuliah Jurusan Ilmu Politik

FISIP Universitas Andalas

By : Andi Saputra, S.Kom, M.Kom (Koordinator ICT)

2016

SINOPSIS MATA KULIAH JURUSAN ILMU POLITIK

1. Pengantar Ilmu Politik

Mata kuliah ini memperkenalkan ilmu politik secara menyeluruh dan memberikan pemahaman dasar-dasar ilmu politik baik secara ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Secara ontologis mata kuliah ini membahas apa yang dipelajari oleh ilmu politik seperti kekuasaan, kewenangan, pengaruh, legitimasi, konflik, negara, masyarakat, kebijakan publik, berbagai model sistem politik dan struktur pemerintahan, sistem perwakilan politik, partisipasi politik, partai politik dan pemilu, perilaku politik, perubahan politik, hubungan negara dengan pasar, demokrasi dan demokratisasi, *good governance* dan *clean governance*, serta politik transaksional. Secara epistemologis mata kuliah ini membahas masalah paradigma/pendekatan/perspektif yang digunakan dalam ilmu politik seperti paradigma perilaku, paradigma pasca-perilaku, dan paradigma kritis berikut metodologi penelitiannya seperti metode kuantitatif, metode kualitatif, dan paduan keduanya. Secara aksiologis mata kuliah ini juga membahas apa tujuan dan manfaat ilmu politik untuk kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas perkembangan ilmu politik di Indonesia dengan melihat pada perkembangan sebagai disiplin yang diajarkan di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia atau secara umum yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan perkembangannya sebagai disiplin yang diwujudkan dalam bentuk jurusan atau program studi di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia.

2. Pengantar Filsafat Ilmu

Mata kuliah ini membahas mengenai filsafat ilmu yang sering dibedakan menjadi dua cabang, yaitu filsafat ilmu alam (*philosophy of natural science*) dan filsafat ilmu sosial (*philosophy of social science*). Secara demikian, tekanan pembahasan diarahkan kepada cabang yang kedua, yaitu filsafat ilmu sosial untuk membantu para mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir secara keilmuan mengenai ilmu (sosial dan ilmu politik) yang positifistik, humanistik, dan kritis melalui dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Secara ontologis dikaji perbedaan pengetahuan biasa (*knowledge*) dan pengetahuan ilmiah (*science*), hakekat ilmu (sosial dan ilmu politik), obyek yang dikaji, hubungan obyek dengan pandangan manusia sebagai pengkaji, sumber-sumber pengetahuan dari ilmu (sosial dan politik) tersebut. Secara epistemologis dikaji bagaimana ilmu (sosial dan politik) itu diperoleh melalui metodologi-metodologinya baik metode positifistik, humanistik, dan kritis. Dalam konteks ini diperlihatkan bagaimana problem-problem metodologis tersebut telah mewarnai sepanjang sejarah ilmu sosial dan ilmu politik tersebut yang besar pengaruhnya terhadap hakekat

dan kedudukannya sebagai ilmu atau seni, atau bahkan pernah disebut juga sebagai ilmu sihir (*sorcery science*), sehingga penemuan-penemuannya sering diragukan baik oleh kalangan akademisi (terutama akademisi ilmu alam) maupun oleh pengambil kebijakan. Akhirnya, secara aksiologis akan diperlihatkan apa kegunaan/manfaat ilmu sosial dan ilmu politik bagi peradaban manusia, apakah bebas nilai atau tidak bebas nilai.

3. Metodologi Ilmu Politik

Matakuliah ini membahas mengenai perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan. Dalam matakuliah ini dibahas secara lebih mendalam sejarah perkembangan ilmu politik, skop dan cakupannya hingga kepada persoalan pendekatan dan metode dalam kajian ilmu politik. Dengan memahami aspek ini, maka dapat diketahui kedudukan ilmu politik dalam rumpun ilmu pengetahuan yang dipelajari. Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik; memiliki pemahaman tentang pendekatan dalam kajian ilmu politik dan implikasinya kepada metode yang diterapkan dalam disiplin ilmu politik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memetakan kedudukan ilmu politik di antara ilmu sosial lainnya.

4. Teori Politik

Mata kuliah membahas berbagai pengertian, perkembangan teori Politik pada jaman klasik, teori Politik jaman pertengahan dan berbagai teori kekuasaan, teori demokrasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan Politik jaman klasik. Mata kuliah ini juga membahas berbagai teori Politik moderen dan kontemporer, teori elite Politik yang dipergunakan oleh berbagai negara. Secara kritis menafsirkan secara menyeluruh perkembangan revolusi behavoiral dan post-behavioral. Selanjutnya akan disajikan gambaran yang utuh tentang bagaimana demokrasi liberal bekerja di negar-negara barat. Dalam kuliah ini juga disajikan analisa Politik dari pendekatan pembangunan.

5. Politik dan Pemerintahan Lokal

Mata kuliah ini diawali dengan membahas konsep politik dan pemerintahan lokal dalam arti pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, serta pemerintahan desa atau nama lainnya (dalam konteks Sumatera Barat disebut pemerintahan nagari). Selanjutnya mahasiswa diajak membahas teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan atau perspektif-perspektif, model-model dalam memahami persoalan-persoalan politik dan pemerintahan lokal. Kemudian mahasiswa diajak pula mengungkap dinamika politik dan pemerintahan lokal dengan fokus kajian dampak politik desentralisasi dan otonomi daerah terhadap pembangunan dan demokratisasi di tingkat lokal.

Di samping itu, dikaji pula kepemimpinan di tingkat lokal, proses pergantiannya melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung atau melalui DPRD, pemilihan kepala desa (pilkades) langsung atau dalam konteks Sumatera Barat disebut pemilihan wali nagari (pilwanag) langsung atau nama lainnya; dampak pemilihan pemimpin lokal terhadap kebijakan-kebijakan dan birokrasi di tingkat lokal; aktor-aktor politik dan pemerintahan lokal; politik etnik atau politik identitas; dan multikulturalisme di tingkat lokal; serta hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik mata kuliah ini juga mengeksplorasi berbagai konsep dan dinamika politik dan pemerintahan dalam konteks etnis dan adat Minangkabau, termasuk mengeksplorasi representasi dan ruang partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan lokal tersebut.

6. Pembangunan Politik

Matakuliah ini mempelajari tentang konsepsi dasar pembangunan Politik yang sering diasosiasikan dengan kajian modernisasi, demokrasi dengan semua dimensi yang ada didalamnya. Konsepsi Pembangunan Politik tersebut dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan Politik suatu negara. Sehingga kuliah ini dirancang agar mahasiswa setidaknya memiliki pemahaman dasar konsepsi pembangunan Politik, termasuk berbagai kompleksitasnya dan mencoba mengaplikasikannya untuk menganalisis fenomena pembangunan Politik suatu negara.

7. Sistem Perwakilan Politik

Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai hakekat perwakilan politik, sejarah serta beberapa pendekatan dalam studi perwakilan politik. Pembahasan mengenai perwakilan politik ini tidak sekedar studi mengenai badan perwakilan, tetapi juga proses-proses dan perilaku-perilaku subyek perwakilan itu sendiri. Selain itu pokok bahasan yang juga sangat erat kaitannya untuk dibahas studi perwakilan politik yakni studi mengenai sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. Pokok bahasan lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas dalam mata kuliah ini adalah studi mengenai perilaku memilih (*voting behavior*). Dengan studi *voting behaviour* ini bukan hanya akan dapat dipahami keterkaitannya dengan pemilihan umum dan kepartaian, tetapi juga keterwakilan politiknya.

Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, memetakan serta menjelaskan sistem perwakilan politik, sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian baik secara teoritik maupun empirik, serta memberikan penilaian tentang bagaimana karakteristik sistem perwakilan politik, sistem pemilu dan sistem kepartaian yang ada di Indonesia.

8. Politik dan Pemerintahan Desa/Nagari

Memahami dan mendeskripsikan berbagai kasus yang terjadi pada tingkatan lokal; kuliah ini capaian akhirnya dalam bentuk praktek lapangan sehingga akan dapat mengasah sensitivitas mahasiswa dalam mengkaji dinamika pemerintahan pada tingkatan lokal (desa dan nagari), yang terkait dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, politik lokal, struktur dan fungsi pemerintahan nagari, produk hukum nagari, kewenangan nagari, kerjasama nagari *good governance* serta beberapa contoh kasus tentang fenomena nagari di Sumatera Barat

9. Pembangunan Partisipatif

Matakuliah ini diawali dengan membahas berbagai teori dan pendekatan pembangunan yang muncul sebagai solusi untuk mengejar ketertinggalan antar negara melalui teori-teori pembangunan liberalis yang mengacu kepada pertumbuhan. Selain itu dibahas pula perspektif teoritis pembangunan yang sebaliknya yang mengacu kepada pemerataan, yakni teori-teori pembangunan yang muncul dari negara-negara berkembang seperti teori pembangunan dan keterbelakangan (*development and underdevelopment theories*) yang bersandar dan diinspirasi oleh teori-teori neo-marxis. Selanjutnya pembahasan difokuskan kepada model pembangunan partisipatif, yang memandang keikutsertaan masyarakat sebagai suatu hal yang tak boleh ditawar-tawar dalam proses pembangunan, yang dimulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks pembangunan Indonesia, dieksplorasi model perencanaan pembangunan partisipatif yang dikenal dengan istilah Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang Desa hingga Musrenbang Nasional.

10. Perempuan dan Politik di Indonesia

Membahas peranan perempuan dalam Politik, kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan dan hubungan dengan negara. Pokok bahasan mencakup perkembangan kajian perempuan dalam ilmu Politik, representasi perempuan dalam Politik, gerakan perempuan, kesetaraan jender, ekofeminisme dan perspektif feminis dalam hubungannya dengan negara.

11. MPIP Kualitatif

Membahas mengenai sejarah munculnya metode kualitatif, prinsip-prinsip dan dasar-dasar penelitian kualitatif serta berbagai jenis metode dan pendekatan yang ada di penelitian kualitatif dibidang ilmu Politik. Selain itu, akan juga diberikan metode pengumpulan data dan analisis data serta penerapannya dalam ilmu Politik,

12. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Kuliah ini bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa guna memahami bagaimana Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa pertanyaan hendak diajukan sebagai dasar mengkaji berbagai topik dalam mata kuliah ini. Bagaimana sejarah pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Bagaimana sejarah perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan bagaimana struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia menurut UUD yang berlaku. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia.

13. Kekuatan Politik Indonesia

Matakuliah ini bertujuan mempelajari konfigurasi kekuatan Politik di Indonesia pada saat berkuasanya Orde Lama, Orde Baru maupun Pasca Suharto dan mencoba untuk menganalisis secara komprehensif kekuatan Politik tersebut.

14. Nasionalisme dan Kewarganegaraan

Mata kuliah ini bertujuan membahas bagaimana hubungan antara nasionalisme dan kewarganegaraan, dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam tradisi kewarganegaraan. Kajian juga berkaitan dengan proses penyatuan berbagai keragaman kelompok dalam masyarakat, termasuk aspek integrasi nasional, multikulturalisme, pengaruh aspek globalisasi terhadap nasionalisme serta berbagai bentuk nasionalisme.

15. Teori Politik Islam

Mata kuliah ini diawali dengan pembahasan mengenai perbedaan konsep pemikiran politik (Islam) dan teori politik (Islam). Selanjutnya dibahas teori politik Islam berdasarkan hubungan erat antara timbulnya pemikiran-pemikiran politik Islam dengan peristiwa-peristiwa historis, misalnya teori sistem sosial, teori kebebasan berfikir, teori penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem sosial ini, yang lahir pada era kenabian. Kemudian dibahas pula mengenai teori Islam dan Politik yang keduanya tak terpisahkan, teori agama dan negara, teori perundang-undangan dan institusi, teori sistem peradaban, teori sistem pemerintahan (tata kelola pemerintahan), teori kebebasan dan kedaulatan, teori transformasi, teori kontrak sosial (baiat Aqabah I dan II).

16. Kebijakan Publik

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan konsep-konsep dasar, teori-teori, model-model, pendekatan-pendekatan, dan siklus proses kebijakan publik, yang terdiri dari tahap perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), perumusan alternatif (*recommendation*), implementasi, dan evaluasi termasuk cara memonitor dan mengetahui kinerja kebijakan. Kemudian dibahas pula berbagai model analisis kebijakan dan para analis (ahli atau professional) kebijakan, serta dinamika proses kebijakan dari peran aktor dan institusi hingga reformasi kebijakan publik. Di samping itu, mahasiswa juga diajak untuk membahas contoh-contoh kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dan kasus-kasus kebijakan aktual dan solusinya. Akhirnya dibahas pula mengenai metode penelitian kebijakan publik, sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan penelitian kebijakan (*policy research*) seperti penelitian tentang isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan kinerja kebijakan dengan berbagai pendekatan metode penelitiannya seperti pendekatan multi-metode, pendekatan kuantitatif dan kualitatif, pendekatan paradigmatis, dan pendekatan politik.

17. Legal Drafting

Mata kuliah ini membahas dan mengajarkan proses dan teknik pembuatan perundang-undangan di Indonesia, baik di tingkat pusat seperti undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun di tingkat daerah seperti peraturan daerah. Dalam mata kuliah ini tidak saja membahas tentang struktur dan fungsi lembaga yang menjalankan proses legislatif tetapi juga mekanisme kerja yang harus dilakukan (baik secara politis maupun teknis). Untuk memberikan pemahaman dan keterampilan tersebut mahasiswa tidak hanya mempelajari dari sumber-sumber *teksbook* tetapi juga dari studi lapangan ke lembaga-lembaga pembuat perundang-undangan.

18. Politik Identitas dan Multikulturalisme

Mata kuliah ini akan membahas mengenai konsep politik identitas, relasi kuasa antara identitas kelompok-kelompok dengan kelompok lain, negara dan pemerintahan dan relasi-relasi kuasa dalam praktik kehidupan sehari-hari. Keberadaan identitas yang dapat dikembangkan menjadi produk untuk memperubutkan kekuasaan dalam ruang publik dan negara. Menjelaskan interaksi diantara identitas-identitas yang saling berebut pengaruh. Mata kuliah ini juga akan membahas dampak politik identitas terhadap kekuasaan negara dan posisi negara dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok dengan identitas tertentu. Mata kuliah juga membahas masalah politik identitas dengan cara pandang multikulturalisme yang mendukung keberagaman kultural dan nilai demokrasi.

Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, memetakan serta menjelaskan politik identitas dalam level makro-politik-dan micro-politik, serta relasi kuasa antara identitas dalam perspektif multikulturalisme. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu menggunakan pendekatan multikulturalisme dalam menganalisis pola-pola penggunaan politik identitas dalam berbagai kasus di Indonesia.

19. Ilmu Politik Islam

Mata kuliah ini pertama-tama membahas makna ilmu politik Islam, yang dalam bahasa penggagasnya Rashid Moten disebut "*political science in Islamic perspective*". Secara demikian mata kuliah ini membahas konsep politik menurut Islam seperti konsep khalifah dan *shari'ah* (*sacred law*), prinsip-prinsip politik, prinsip-prinsip kekuasaan dan kedaulatan, pengaturan urusan-urusan rakyat yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam, kewajiban berpolitik bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, konsep mengenai negara dan pemerintahan (Piagam Madinah), tujuan negara dan pemerintahan, prinsip-prinsip kepemimpinan dan jama'ah (ummah), pergantian pemimpin melalui prinsip musyawarah (*syura*) baik secara langsung maupun melalui perwakilan, prinsip bai'at, jihad, dan khilafah, dan keadilan.

20. Pemikiran Politik Islam

Matakuliah ini membahas pemikiran Islam tentang masyarakat, negara dan kekuasaan dan aliran-aliran pemikiran politik yang berkembang sejak zaman nabi, kekhalifahan, abad pertengahan hingga saat ini. Kemudian dibahas mengenai relasi Islam dengan politik-ketatanegaraan dari perspektif normatif dan empirik. Dari perspektif normatif dipaparkan kembali konsep politik menurut al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana telah dibahas dalam mata kuliah Ilmu Politik Islam. Dari perspektif empirik dieksplorasi berbagai ragam ide dan varian pemikiran politik Islam dan pengalaman kesejarahan masyarakat Muslim zaman klasik, pertengahan, modern dan kontemporer. Pembahasan ini dimulai dari pembentukan Negara Madinah, periode Khulafa al-Rasyidin, masa kedisnatan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, pemikiran politik tokoh-tokoh Muslim dari Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani hingga Abul A'la Maududi dan pemikir-pemikir politik dari negara-negara Muslim kontemporer. Dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai dinamika dan ragam pemikiran politik Islam di Indonesia seperti M.Natsir, Nurcholis Majid, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais.

21. Teori Politik Islam

Mata kuliah ini diawali dengan pembahasan mengenai perbedaan konsep pemikiran politik (Islam) dan teori politik (Islam). Selanjutnya dibahas teori politik Islam berdasarkan hubungan erat antara timbulnya pemikiran-pemikiran politik Islam dengan peristiwa-peristiwa historis, misalnya teori sistem sosial, teori kebebasan berfikir, teori penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem sosial ini, yang lahir pada era kenabian. Kemudian dibahas pula mengenai teori Islam dan Politik yang keduanya tak terpisahkan, teori agama dan negara, teori perundang-undangan dan institusi, teori sistem peradaban, teori sistem pemerintahan (tata kelola pemerintahan), teori kebebasan dan kedaulatan, teori transformasi, teori kontrak sosial (baiat Aqabah I dan II).

22. Feminisme dalam Islam

Mata kuliah ini diawali dengan membahas diskursus gender dalam agenda feminisme kontemporer yang banyak memfokuskan diskusi dan aksi mereka pada persamaan hak, partisipasi perempuan dalam sektor publik, pendidikan, kebebasan seksual maupun hak reproduksi. Dalam konteks ini dibahas perjuangan kaum feminis sejak abad 17 hingga 21 yang telah mengalami pasang surut dan perluasan wilayah tuntutan dan agenda perjuangan yang jauh lebih rumit bahkan menuntut satu studikhususterhadapwacananini. Di sini juga dipaparkan stereotip Barat tentang perlakuan Islam melalui konsep hegemoni laki-laki terhadap perempuan yang dikebiri hak asasinya untuk maju dan berkembang di luar rumah (di sektor publik) dan karenanya perempuan adalah di rumah. Selanjutnya dibahas feminisme menurut konsep Islam, yang meletakkan perempuan pada posisi yang layak dan terhormat demi kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, dengan fokus kajian pada peran mereka baik sebagai anak, remaja, dewasa, ibu rumah tangga, dan lain-lain seperti peran mereka di panggung bisnis, politik, pendidikan, keagamaan dan sosial, dan peperangan. Di sini juga dipaparkan bahwa sejak sejarah awal Islam, perempuan telah didorong dan ditempatkan oleh Islam pada posisi yang mulia yang belum pernah diberikan oleh suku bangsa dan peradaban tua manapun sebelum Islam. Dan, dalam konteks lokal secara khusus dieksplorasi konsep feminisme dalam etnik Minangkabau.

23. Radikalisme dan Fundamentalisme Islam

Mata kuliah ini diawali dengan membahas kait-mengait antara konsep dan sejarah munculnya fundamentalisme dan radikalisme. Kemudian membahas tipologi kedua faham ini berdasarkan kemunculannya pada masa pra-modern dan kontemporer atau sering disebut juga sebagai masa tradisional dan modern atau berdasarkan tipologi ekstrim (*ushūliyyah mutharrifah*) dan “yang dikehendaki” (*ushūliyyah mathlūbah*). Fundamentalisme pada masa tradisional misalnya ditandai dengan gerakan Wahabi yang muncul pada abad ke-18 di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul

Wahab di Arab; sedangkan fundamentalisme modern ditandai dengan Ikhwanul Muslimin (1928) di Mesir dan Jamaah Islam (1941) di Pakistan. Selanjutnya dalam konteks radikalisme akan dibahas dua tipologi pula, yaitu “gerakan Islam radikal-kritis” yang muncul karena adanya tekanan sosial, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan sosial yang dilakukan kolonial terhadap golongan pribumi; dan “gerakan Islam radikal-fundamentalis” yang bersifat ideologis, anti dialog-eksklusif-tanpa kompromi-anti bid’ah, dan bersifat internasional. Pembahasan kedua tipologi gerakan radikal ini dikaitkan dengan kemunculan radikal-fundamentalis abad kontemporer yang bersifat internasional yang ditandai dengan Al-Qaidha (1980an) di bawah pimpinan Usamah bin Laden, termasuk jaringannya di Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia yang ditandai dengan munculnya Jama’ah Islamiyah di bawah pimpinan Abdullah Sungkar, Mujahiddin Indonesia di bawah pimpinan Abu Bakar Basyir.

24. Islam dan Demokrasi

Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk melihat hubungan Islam dan demokrasi, yang diawali dengan pembahasan mengenai tiga pandangan tentang hubungan Islam dan demokrasi: pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda; kedua, Islam berbeda dengan demokrasi jika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti difahami dan dipraktekkan di negara-negara Barat; ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung system politik demokratis seperti yang dipraktekkan di negara-negara maju. Pokok bahasan yang lain adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam: *Syura* (musyawarah), *al’adalah* (keadilan), *al-musawah* (kesejajaran), *al-amanah* (diperacaya), *al-masuliyah* (tanggungjawab), dan *al-hurriyah* (kebebasan). Dalam konteks Indonesia dibahas pemikiran tokoh-tokoh seperti Nurcholis Majid, Gus Dur, dan Amien Rais, sembari menarik kesimpulan di Indonesia cenderung mengikuti pandangan yang mana dari ketiga pandangan mengenai hubungan Islam dan demokrasi.

25. Teori dan Metode Perbandingan Politik

Perkembangan ilmu politik tidak hanya berasal dari fenomena yang ada pada satu negara saja, namun juga dapat dilihat dari realita di banyak negara. Tentu untuk memahami bagaimana realita politik itu berkembang diperlukan pemahaman terhadap teori dan metode perbandingan politik. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan konsep perbandingan politik, khususnya dalam menjelaskan objek politik yang dibandingkan oleh mahasiswa. Selain itu, untuk mendasari analisis dalam perbandingan politik, matakuliah ini juga membahas metode perbandingan yang sesuai dengan kaedahnya. Dengan mempelajari matakuliah

ini mahasiswa mampu menguasai teori dan mengaplikasikan metode perbandingan politik untuk menjelaskan realita politik di banyak negara.

26. Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu

Sistem kepartaian dan pemilu menjadi indikator dalam pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Oleh karenanya untuk mengetahui praktik demokrasi suatu negara, maka mahasiswa perlu memahami dan mendalami sistem kepartaian dan pemilu tersebut. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang Sistem Kepartaian dan Pemilu dan perbandingan pelaksanaannya. Setelah mengambil matakuliah ini mahasiswa dapat memahami dan membandingkan pelaksanaan Sistem Kepartaian dan Pemilu.

27. Perbandingan Sistem Parlemen

Dasar penyelenggaraan suatu negara dipengaruhi oleh konstitusi dan perundang-undangan yang mengaturnya. Konstitusi dan perundang-undangan dibuat dalam parlemen yang merupakan representasi kekuatan partai politik yang mewakili rakyat di negara tersebut. Dinamika yang terjadi di parlemen menentukan kualitas produk perundang-undangan yang dihasilkan. Karenanya mata kuliah ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan dinamika pelaksanaan fungsi parlemen di berbagai negara dan implikasinya dalam perkembangan demokrasi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan membandingkan sistem parlemen di berbagai negara.

28. Transnational Crime

Perkembangan globalisasi membawa dampak kepada negara-negara yang ada di dunia. Selain membawa dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif pada masyarakat suatu negara. Misalnya, kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba, kejahatan perang, masalah kejahatan yang melibatkan Interpol dan sebagainya. Mata kuliah ini mengajarkan pada mahasiswa tentang perubahan sosial yang berlangsung dalam sistem internasional yang berdampak pada masyarakat di suatu negara. Dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami implikasi sosial dari globalisasi yang terjadi lintas negara.

29. Organisasi Transnasional dan Multi National Corporation

Globalisasi menghasilkan ketergantungan di antara negara-negara dalam sistem antara bangsa. Saling ketergantungan ini menghasilkan kerjasama dalam pelbagai bentuk organisasi transnasional dan bahkan korporasi antar negara. Dalam kaitan itu, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dan kemampuan analisis kepada mahasiswa terkait dengan kemunculan organisasi

transnasional dan korporasi yang melewati sempadan negara. Dengan memahami matakuliah ini mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk kerjasama yang terjadi antar negara yang berdampak pada kedaulatan negara.

30. Perbandingan Sistem Federalisme dan Unitarianisme

Pada umumnya sistem pemerintahan di banyak negara terkelompok kepada dua bentuk yang lazim di terapkan, yaitu sistem federal dan sistem kesatuan (Unitarian). Kedua sistem ini mempengaruhi praktik demokrasi di negara-negara yang mengamalkannya. Mata kuliah ini bertujuan menjelaskan penyelenggaraan sistem federalism dan unitarianisme beserta kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan sejarah perkembangan kedua sistem ini dan implikasi politiknya, terutama di negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan membandingkan pelaksanaan sistem federalism dan unitarianisme di berbagai negara.

31. Pemikiran Politik Indonesia

Matakuliah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pemikiran tokoh-tokoh Politik, perkembangan serta pengaruhnya dalam sistem kePolitikan di Indonesia. Penjelasan ini dimulai masa 1900-an tatkala Indonesia sudah mamau melahirkan tokoh-tokoh Politik yang memiliki perhatian terhadap kemerdekaan dan penciptaan semangat kebangsaan dan kenegaraan seperti Soekarno, M. Hatta, M. Natsir, dst. Sementara, pengembangan matakuliah ini juga dilakukan terutama dalam menyoroti tokoh-tokoh Politik kontemporer yang pemikirannya berpengaruh dalam sistem Politik seperti Soeharto, Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dst. Pada akhirnya mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan membuat pemetaan (*mapping*) dalam memahami gejala pemikiran Politik yang berkembang dalam sistem KePolitikan di Negara Indonesia.

32. Governance

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai teori, konteks, perkembangan dan relevansi studi *governance*, yang diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang munculnya subjek *Governance* dalam khazanah Ilmu Politik. Misalnya, perkembangan dan proses perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa konsekuensi penting bagi penciptaan sebuah tata pemerintahan (*governance*) yang berbasis dan memihak kepentingan publik. Pokok-pokok bahasan mata kuliah ini antara lain: Negara dan pasar sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan; *governance* berporos pasar (untung-rugi mengadopsi

neo-liberal); *governance* berporos negara; *governance* sebagai pengembangan dan pendayagunaan infrastruktur kebijakan; *governance* sebagai pengelolaan konflik; *governance* sebagai solusi tatanan sentralistik versus desentralisasi seluas-luasnya; *network-based governance*; partisipasi publik versus manajemen strategis; konsensus, inklusivitas dan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi yang tersembunyi; transparansi, akuntabilitas dan keluhuran budi pemimpin; konflik hukum dan penegakan hukum; responsifitas dalam penentuan kepentingan publik dan regulasi responsive. Di samping itu, mata kuliah ini juga akan membahas kasus-kasus tertentu melalui diskusi kasus terpilih (hasil *governance* dan *decentralization survey*, simulasi kasus kebijakan sensitive-gender, simulasi kasus kebijakan penanganan kemiskinan, pengembangan *good governance* melalui pelayanan publik, penanganan kasus-kasus korupsi di pusat dan daerah-daerah).